



Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandar Lampung, 5 Januari 2024



Ashari Syarief, S.Pi., M.P
NIP 196905151995031002



Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	7
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi	24
C. Penjelasan Atas-Pos-pos neraca	32
D. Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional	49
E. Penjelasan atas Perubahan laporan perubahan ekuitas	58
VI. Lampiran dan Daftar	68



Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Lampung
(032.13.1200.649615.000.KD)

Jl. Soekarno-Hatta No.91 Km 6-7 , Campang Raya,Kec.Sukabumi
Bandar Lampung, 0721-770087

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan **Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung** yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran,Neraca,Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan **Tahun Anggran 2023 (31 Desember)** sebagaimana terlampir,adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, 5 Januari 2024
Kepala



Ashari Syarief,S.Pi.,M.P
NIP 196905151995031002

Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahunan (31 Desember) TA 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Posisi Tahun Anggaran 2023 (31 Desember) adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.429.529.405 atau mencapai 129,96 persen persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.1.100.000.000

Realisasi Belanja Negara pada Posisi Tahun 2023 (31 Desember) adalah sebesar Rp. 11.714.414.225 atau mencapai 95,92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 12.212.630.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Posisi 31 Desember 2022. Nilai Aset per Posisi Tahun Anggaran 2023 (31 Desember) dicatat dan disajikan sebesar Rp.22.049.162.680 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 140.475.801,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.21.908.686.879,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.44.383.174,- dan Rp.22.004.779.506,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Posisi **Tahun Anggaran 2023 (31 Desember)** adalah sebesar **Rp.1.421.320.000,-** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp. 11.278.742.720,-** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp(9.857.422.720).** Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp.(9.857.392.965)** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(9.857.392.965),-**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar **Rp. 21.568.263.551,-** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp(9.857.392.965)** ditambah dengan koreksi-koreksi senilai **Rp.0** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp.10.293.908.920,-** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp. 22.004.779.506,-**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Laporan Realisasi Anggaran

**BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG**
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23		% thd Angg	31-Dec-22
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.100.000.000	1.429.529.405	129,96	1.634.695.999
JUMLAH PENDAPATAN		1.100.000.000	1.429.529.405	129,96	1.634.695.999
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	6.690.276.000	6.517.153.037	97,41	6.415.183.123
Belanja Barang	B.4	4.719.217.000	4.394.480.188	93,12	3.050.878.269
Belanja Modal	B.5	803.137.000	802.781.000	99,96	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-
JUMLAH BELANJA		12.212.630.000	11.714.414.225	95,92	9.466.061.392

Neraca

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

N E R A C A

PERIODE 31 Desember 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Belanja Dibayar dimuka	C.3	7.500.000	7.550.000
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	132.975.801	97.341.375
Jumlah Aset Lancar		140.475.801	104.891.375
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	10.143.396.960	10.143.396.960
Peralatan dan Mesin	C.15	9.248.347.533	9.188.538.178
Gedung dan Bangunan	C.16	11.495.926.700	11.495.926.700
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	15.833.350	15.833.350
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(8.994.817.664)	(9.329.373.664)
Jumlah Aset Tetap		21.908.686.879	21.514.321.524
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		22.049.162.680	21.619.212.899
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	44.383.174	50.949.348
Utang yang belum ditagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		44.383.174	50.949.348
JUMLAH KEWAJIBAN		44.383.174	50.949.348
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	22.004.779.506	21.568.263.551
JUMLAH EKUITAS		22.004.779.506	21.568.263.551
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		22.049.162.680	21.619.212.899

Laporan Operasional

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.421.320.000	1.617.695.000
JUMLAH PENDAPATAN		1.421.320.000	1.617.695.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.510.453.037	6.412.495.123
Beban Persediaan	D.3	339.362.172	353.151.737
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.408.589.411	1.663.039.424
Beban Pemeliharaan	D.5	548.797.256	526.570.343
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.065.099.699	554.876.519
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	406.441.145	747.880.107
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		11.278.742.720	10.258.013.253
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9.857.422.720)	(8.640.318.253)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar		4.231.055	(9.180.463)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		6.205.555	17.000.999
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		1.974.500	26.181.462
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Surplus /Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(4.201.300)	-
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.003.850	
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.205.150	
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		29.755	(9.180.463)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9.857.392.965)	(8.649.498.716)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-

**BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
EKUITAS AWAL	E.1	21.568.263.551	22.374.812.224
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9.857.392.965)	(8.649.498.716)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		59.400
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	59.400
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		10.293.908.920	7.842.890.643
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	436.515.955	(806.489.273)
EKUITAS AKHIR	E.5	22.004.779.506	21.568.204.151

Catatan Atas Laporan Keuangan

Dasar Hukum
entitas dan
rencana
strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Karantina Ikan

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No.91 KM 6-7 Campang Raya Bandar Lampung.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya dilakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung berkomitmen dengan :

MOTTO :

Balai KIPM Lampung yaitu : **OKE SIP** “ Objektif, Kridibel, Efesien, Sinergi, dan Profesional”

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung berkomitmen dengan :

VISI:

“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

MISI :

“Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (Sovereignty), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (Sustainability), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan

keanekaragaman hayati laut ;

2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Kebijakan Mutu Integritas Balai KIPM Lampung

Menjamin Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil perikanan melalui :

1. Memberikan pelayanan,berkomitmen patuh terhadap Sistem manajemen integritas sesuai ruang lingkup yang diterapkan dan secara berkelanjutan meningkatkan efektifitas penerapannya;
2. Berkomitmen dalam melaksanakan pelayanan sertifikasi, inspeksi dan pengujian dengan menerapkan Sistem Manajemen Integritas;
3. Stasiun KIPM Cirebon sebagai lembaga Inspeksi berkomitmen meminimalisir kasus penolakan ekspor di negara mitra;
4. Semua personil memahami dan menerapkan sistem manajemen integritas.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

Mempunyai ASN sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan), meliputi : Kepala UPT, Kaur Tata Usaha, Sub Koordinator Wasdalin, Sub Koordinator Tata Pelayanan, Fungsional Tertentu sebanyak 39 dan Fungsional Umum sebanyak 10 pegawai, dan PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negari)sebanyak 13 Orang.

*Pendekatan**Penyusunan**Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode **Tahun Anggaran 2023 (31 Desember)** ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung**. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran***A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung** dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi
Aset***A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode **Tahun Anggaran 2023 (31 Desember)** telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung**. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung** adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA*Pendapatan-LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO***(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah

BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap***b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal

Kekayaan negara, Kementerian keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Nilai aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset
Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

a. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 5 Kali Revisi.

Rekapitulasi Revisi DIPA Selama TA 2023:

No	Uraian	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
1	Data Awal	30 November 2022	-
2	Revisi Ke-1	27 Februari 2023	Revisi Halaman III DIPA
3	Revisi Ke-2	02 Juli 2023	Revisi Halaman III DIPA
4	Revisi Ke-3	19 Oktober 2023	Revisi Halaman III DIPA
5	Revisi Ke-4	24 Oktober 2023	Revisi Halaman III DIPA
6	Revisi Ke-5		Revisi Halaman III DIPA

Uraian	31-Dec-23	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1.100.000.000	1.100.000.000
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	1.100.000.000	1.100.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.690.276.000	6.690.276.000
Belanja Barang	4.719.217.000	4.719.217.000
Belanja Modal	803.137.000	803.137.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	12.212.630.000	12.212.630.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2023 (31 Desember) adalah sebesar **Rp 1.429.529.405,-** atau mencapai 130 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp 1.100.000.000,-** Pendapatan Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	1.100.000.000	1.429.529.405	129,96
Penerimaan Belanja Pegawai TA lalu		-	
Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya		-	
Jasa Giro		-	
Pendaapatan TGR TA lalu	-	-	-
Jumlah	1.100.000.000	1.429.529.405	129,96

Realisasi Pendapatan Jasa Periode **Tahun Anggaran 2023 (31 Desember)** mengalami Penurunan 13 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan adanya penurunan penerimaan karena PP nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adanya komoditi yang tidak dikenakan PNBP dari pelayanan (jasa) Sensor Karantina dan Pemeriksaan/Pengawasan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dan Permen KP no.35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata cara Pengenaan Tarif Sampai Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Periode **Tahun Anggaran 2023 (31 Desember)** terdapat Realisasi Pendapatan sebesar **Rp. 1.429.529.405,-** dari Pendapatan Sensor Karantina, Pengawasan / Pemeriksaan (425332) dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya (425289). Pendapatan dari pemindahtanganan BMN sebesar Rp. 0. serta Pendapatan dari Belanja Pegawai Tahun anggaran yang lalu sebesar Rp 0.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023
dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI 31 Des 2023	REALISASI 31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	1.429.529.405	1.634.695.999	-12,55
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	-	-	
Pendapatan Belanja TAYL	-	-	
Jumlah	1.429.529.405	1.634.695.999	-12,55

B.2. Belanja

Realisasi Belanja

Negara

Rp.11.714.414.225,-

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 11.714.414.225,-** atau **96%** dari anggaran belanja sebesar **Rp. 12.212.630.000** ,- Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2023

Uraian	31-Dec-23		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.690.276.000	6.517.153.037	97,41
Belanja Barang	4.719.217.000	4.394.480.188	93,12
Belanja Modal	803.137.000	802.781.000	99,96
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	12.212.630.000	11.714.414.225	95,92
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	12.212.630.000	11.714.414.225	95,92

Dibandingkan dengan 31 Desember 2022, Realisasi Belanja periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 23.75% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan karena adanya kenaikan tunjangan dan gaji pokok
2. Belanja barang mengalami kenaikan
3. Adanya Belanja Modal tahun 2023

Perbandingan Realialisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.517.153.037	6.415.183.123	1,59
Belanja Barang	4.394.480.188	3.050.878.269	44,04
Belanja Modal	802.781.000	-	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	11.714.414.225	9.466.061.392	23,75

Belanja Pegawai Rp.
6.517.153.037,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.517.153.037,- dan Rp. 6.415.183.123,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja 31 Desember 2023 mengalami Kenaikan sebesar 1.59 persen dari 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja pegawai naik dikarenakan adanya Perubahan Jabatan Fungsional dan kenaikan pangkat..

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.997.433.724	2.307.856.600	29,88
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja uang makan	357.994.000	378.521.000	-
Belanja Lembur	169.129.000	171.465.000	(1,36)
Belanja Tunjangan Kinerja	2.992.596.313	3.557.340.523	(15,88)
Jumlah Belanja Kotor	6.517.153.037	6.415.183.123	1,59
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	6.517.153.037	6.415.183.123	1,59

Belanja Barang Rp
4.394.480.188,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.4.394.480.188,- dan Rp. 3.050.878.269,-. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 44.04% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan naiknya kegiatan belanja barang persediaan, barang non operasional, belanja jasa dan belanja perjalanan dalam negeri.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 Dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Jasa	666.299.205	1.644.436.076	(59,48)
Belanja Pemeliharaan	508.459.576	526.570.343	(3,44)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.065.099.699	554.876.519	91,95
Belanja Barang Persediaan bahan Baku dan Konsumsi	412.515.328	324.975.331	26,94
Belanja Operasional	911.947.330		100,00
Belanja Non Operasional	830.159.050		100,00
Jumlah Belanja Kotor	4.394.480.188	3.050.858.269	44,04
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	4.394.480.188	3.050.858.269	44,04

Belanja Modal Rp.
802.781.000,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.802.781.000,- dan Rp. 0,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 100,00 persen dibandingkan TA 2022, karena belum adanya realisasi belanja modal pada posisi 31 Desember 2022 ini dibandingkan dengan periode TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	802.781.000	0	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	802.781.000	0	100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	802.781.000	0	100,00

Belanja Modal Tanah
Rp.0,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tidak Terdapat realisasi belanja modal tanah periode 31 Desember 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	100,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp.0,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan TA. 2022 adalah sebesar Rp. 802.781.000,-, dan Rp. 0,-terjadi kenaikan sebesar 100,00% untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Periode 31 desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	
Alat Ukur	0	0	
Alat Kantor	0	0	0,00
Alat Rumah Tangga	0	0	0,00
Alat Studio	0	0	0,00
Peralatan Pemancar	0	0	0,00
Unit Alat Laboratorium	802.781.000	0	100,00
Alat Komunikasi	0	0	0,00
Alat Kedokteran	0	0	0,00
Komputer Unit	0	0	0,00
Peralatan Komputer	0	0	0,00
Alat Peraga Pelatihan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	802.781.000	0	100,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	802.781.000	0	100,00

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan
Rp. 0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0,- Tidak ada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Periode Laporan 31 Desember 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Renovasi Atap Gedung	0	0	0,00
	0		0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-

Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp. 0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Periode Laporan 31 Desember 2023 ini

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2023	REALISAS 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan, Pemasangan Tambah Daya Listrik	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal lainnya
Rp. 0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Periode Laporan 31 Desember 2023 ini.

Belanja Bantuan Sosial
Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada Realisasi Belanja bantuan Sosial pada Pelaporan Periode 31 Desember 2023 ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Periode
31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	0,00
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2023	31-Dec-22
Uang Tunai	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	31-Dec-23	31-Dec-22
Pendapatan Jasa (Sensor/Karantina Ikan)	-	-
Pedapatan dari pemindahtanganan BMN	-	-
penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun anggaran yang lalu	-	162.350
penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun anggaran yang lalu	-	1.841.500
Jumlah	-	2.003.850

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp.0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	31 Jdesemeber 2023	TH 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Jumlah	-	-

Untuk Periode 31 Desember 2023 Balai KIPM Lampung tidak terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas senilai **Rp. 0**

Piutang Bukan Pajak
Rp. 0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	31-Dec-23	TA 2022
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

TP/TGR

Rp0.00

(TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi periode 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	31-Dec-23	Tahun 2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		0	0
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA

Rp.0,00

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) periode 31 Desember 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	31-Dec-23	TA 2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak

Tertagih – Piutang

Bukan Pajak

Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidakterttagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-piutnag bukan pajak pada

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Bukan Pajak	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,50%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Belanja Dibayar di Muka
Rp 7.500.000,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka periode 31 Desember 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.7.500.000,- dan Rp.0,-. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	31-Dec-23	TA 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gudang Arsip	7.500.000	-
Jumlah	7.500.000	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima periode 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai

berikut:

Persediaan

Rp. 132.975.801,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.132.975.801,- dan Rp. 97.341.375,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan

per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31-Dec-23	2022
Barang Konsumsi	98.934.876	15.954.605
Barang untuk Pemeliharaan		6.700.000
Suku Cadang		62.214.670
Pita Cukai, Materai dan Leges		-
Bahan Baku	34.040.925	12.472.100
Jumlah	132.975.801	97.341.375

Saldo Persediaan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 132.975.801,-** (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.97.341.375 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 35.634.426,-(Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Akun	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	15.954.605	82.980.271	98.934.876
117112	Amunisi	-	-	-
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	6.700.000	(6.700.000)	-
117114	Suku Cadang	62.214.670	(28.173.745)	34.040.925
117121	Pita Cukai, Materai dan Legas	-	-	-
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117131	Bahan Baku	12.472.100	(12.472.100)	-
117191	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-
117199	Persediaan Lainnya	-	-	-
TOTAL		97.341.375	35.634.426	132.975.801

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan opname fisik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor: B.2857/BKIPM.LPG/PL.820/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp.97.341.375,- (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*),

Balai KIPM Lampung tidak memiliki barang persediaan dalam kondisi rusak maupun usang sampai dengan akhir periode Semester II TA.2023 per 31 Desember 2023.

Pencatatan Bahan Laboratorium

Pencatatan Bahan Laboratorium pada Aplikasi Persediaan menggunakan satuan kemasan sedangkan di Laboratorium Balai KIPM Lampung pemakaian bahan laboratorium menggunakan satuan volume bahan laboratorium. Sehingga pencatatan di aplikasi persediaan dan laboratorium memiliki perbedaan. Stock opname Bahan Laboratorium telah dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan sisa yang ada di gudang bahan laboratorium Balai KIPM Lampung.

Pencatatan Sertifikat HC

Balai KIPM Lampung telah melakukan pencatatan health certificate (HC) dengan satuan eksemplar dan setiap sertifikat kesehatan yang telah diterima oleh Balai KIPM Lampung baik dari UPT Pusat maupun kantor daerah lingkup BKIPM telah tercatat di aplikasi persediaan.

Tagihan TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 31 Desember 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.00. Tuntutan

Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2023	TA 2022
1		-	-
		0	0
Jumlah		-	-

TPA
Rp0.00

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) periode 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2022	TA 2021
1			
2			
3			
4			
5		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0,00

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang periode 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Tanah

Rp10.143.396.960

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Balai KIPM Lampung periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp10.143.396.960,- dan Rp10.143.396.960,- tidak Terdapat Realisasi pada periode 31 Desember 2023, Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	10.143.396.960
Mutasi tambah:	0
Pengurukan dan Pematangan Tanah	0
Mutasi kurang:	
Selisih Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2023	10.143.396.960

Rincian saldo Tanah periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	390 m2	Tarahan Lampung Selatan	208.368.960
2	1000 m2	Wilker Bakauheni	157.000.000
3	3280 m2	Soekarno Hatta Bandar Lampung	9.778.028.000
4	-		-
5	-		-

Peralatan dan Mesin

Rp. 9.188.538.178,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2023 dan 2022

adalah Rp.9.168.538.178,- dan Rp.9.721.521.945,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	9.168.538.178
Mutasi tambah:	
Pembelian	802.781.000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	9.971.319.178
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	334.556.000
Nilai Buku per 31 Desember 2022	10.305.875.178

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

Mutasi Tambah :

Tidak ada Mutasi Tambah pada periode 31 Desember 2022

Mutasi Kurang :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan
Rp 11.495.926.700

C.16. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.11.495.926.700 dan Rp.11.495.926.700 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada anggar pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	11.495.926.700
Mutasi tambah:	
Pengembangan Langsung Berupa Renovasi Atap Gedung Bangunan	-
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Saldo per 31 Desember 2023	11.495.926.700
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	11.495.926.700

Mutasi Tambah :

- Mutasi Tambah pada periode 31 Desember 2023 senilai Rp (0)

Mutasi Kurang :

- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp. (0)
-

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp 0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp..0 Pada periode 31 Desember 2023 Tidak ada Transaksi penambahan Jalan,Irigasi dan Jaringan pada periode 31 Desember 2023 ,Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Selisih Revaluasi Aset	-
Koreksi Pencatatan Hasil penilaian kembali	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp15.833.350

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp15.833.350 dan Rp15.833.350 Aset tetap tersebut berupa Buku-buku perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode 31 Desember 2023 . Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	15.833.350
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2023	15.833.350
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	15.833.350

Konstruksi Dalam

Pengerjaan

Rp. 0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp0.

Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap

Rp(8.994.817.664)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(8.994.817.664) dan Rp(9.329.373.664). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	9.775.349.675	8.108.425.986	1.666.923.689
2	Gedung dan Bangunan	11.495.926.700	1.366.457.141	10.129.469.559
3	Tanah	10.143.396.960	0	10.143.396.960
4	Aset Tetap Lainnya	15.833.350	0	15.833.350
Akumulasi Penyusutan		31.430.506.685	9.474.883.127	21.955.623.558

Aset Tak Berwujud

Rp0,00

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Balai KIPM Lampung tidak mempunyai Aset Tak Berwujud pada Kantor Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah

sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	0
	0
Jumlah	0

Aset Lain-Lain Rp. 0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya periode 31 desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0 .Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra

akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Uang Muka dari KPPN
Rp.0,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

1. Nilai Utang kepada Pihak Ketiga periode 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.44.383.174,- dan Rp.52.084.964, Utang kepada Pihak Ketiga (berupa belanja Langganan listrik, telepon, air dan internet) merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Balai KIPM Lampung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.44.383.174,- Terdiri dari

- Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 11.692.000.
- Belanja Pegawai Berupa Uang Lembur bulan Desember 2023 sebesar Rp.6.404.000.
- Belanja Langganan Listrik Bulan Desember 2023 sebesar Rp.22.746.534.
- Belanja Langganan Telepon Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 1.813.750.
- Belanja Layanan Daya dan Jasa Lainnya sebesar Bulan Desember 2023 sebesar Rp.1.726.890

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Langganan Listrik yang Masih Harus Dibayar	22.746.534	
Belanja Langganan Telepon yang Masih Harus Dibayar	1.813.750	
Belanja Langganan Daya dan Jasa yang Masih Harus Dibayar	1.726.890	
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	18.096.000	
Total	44.383.174	

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNB, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada periode TA Pendapatan yang Ditangguhkan pada Kantor Balai KIPM Lampung per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNB	-
PPh yang belum disetor	-
Total	-

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka periode 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan diterima di muka

Uraian	Jumlah
Total	-

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar periode 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar

harus dibayar
Rp.44.383.174,-

Rp.44.383.174,- dan Rp0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga berupa Tagihan Listrik, PDAM, Telp dan Lagganan Internet Speedy, yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31-Dec-23	Tahun 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	18.096.000	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	26.287.174	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	-
Jumlah	44.383.174	-

Ekuitas
Rp.22.004.779.506

C. Ekuitas

Ekuitas periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.004.779.506,- dan Rp.21.568.263.551,- . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp.1.429.529.405

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 1.429.529.405,- dan Rp. 1.617.695.000 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 Desember 2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	1.421.320.000	1.617.695.000	87,9
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	6.205.555		
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	-	-
Penerimaan belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	162.350		
Penerimaan belanja barang tahun anggaran yang lalu	1.841.500		
Jumlah	1.429.529.405	1.617.695.000	88,4

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan/Jasa Sensor Sertifikasi Mutu senilai Rp. 1.421.320.000,-, Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Rp. 6.205.555,- Penerimaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu Rp. 162.350,- dan Penerimaan Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu Rp. 1.841.500,-

Beban Pegawai
Rp 6.387.699.123

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.510.452.937,- dan Rp.6.387.699.123,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	2.336.994.300	2.307.856.600	101
Beban Tunjangan-Tunjangan	653.703.958	641.689.044	102
Beban Uang Makan	357.994.000	359.814.000	99
Beban Pembulatan Gaji PNS	35.366	33.183	107
Beban Tunjangan Kinerja	2.992.596.313	2.915.618.296	103
Uang Lembur	169.129.000	162.688.000	104
Jumlah	6.510.452.937	6.387.699.123	102

Beban
Persediaan Rp.

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada periode 30 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-

132.975.801,-

masing sebesar Rp.132.975.801,- dan Rp. 97.341.375,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	98.934.876	15.954.605	83,87
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges		-	-
Beban Bahan Baku	34.040.925	12.472.100	63,36
Beban Persediaan Suku Cadang		62.214.670	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan		6.700.000	(100,00)
Jumlah Beban Persediaan	132.975.801	97.341.375	26,80

Beban Barang

dan Jasa

Rp.2.408.589.411

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.408.589.411,- dan Rp1.1.663.039.424,- Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa posisi periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	304.113.031	250.696.896	21,31
Beban Sewa	205.270.000	71.300.000	187,90
Beban Jasa Profesi	82.800.000	22.400.000	269,64
Beban Jasa Lainnya	74.300.000	30.432.500	144,15
Beban Barang dan Jasa		0	0,00
Beban bahan	711.796.050	355.320.700	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	8.160.000	8.160.000	0,00
Beban barang Non Operasional lainnya	110.203.000	65.844.000	67,37
Beban Keperluan Perkantoran	643.630.000	617.708.700	4,20
beban penambah Daya tahan tubuh	61.431.330	0	100,00
Beban Pengiriman surat dinas pos surat		0	0,00
beban Honor operasional satker	196.786.000	205.470.000	-4,23
beban barang operasional lainnya	10.100.000	15.528.280	-34,96
beban barang operasional lainnya-penangan	-	1.575.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas	1.065.099.699	0	100,00
Jumlah	3.473.689.110	1.644.436.076	111,24

Beban

Pemeliharaan Rp.
508.459.575,-.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.508.459.575,- dan Rp.526.570.343- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195.245.000	195.244.000	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	308.584.575	317.455.343	-2,79
Beban persediaan untuk Barang konsumsi		0	0,00
Beban persediaan Suku Cadang		0	0,00
Beban Persediaan Bahan Pemeliharaan		0	0,00
Beban Pemeliharaan jalan dan jembatan	4.630.000	13.871.000	-66,62
Jumlah	508.459.575	526.570.343	-3,44

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.1.065.099.699
,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.065.099.699,- dan Rp.554.876.519,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	680.119.393	321.803.556	111,35
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	146.775.000	46.026.000	218,90
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	238.205.306	187.046.963	27,35
	0	0	0,00
Jumlah	1.065.099.699	554.876.519	91,95

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Beban Barang untuk Diserahkan kepada

Masyarakat
Rp0.00

Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Bantuan
Sosial Rp.0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Periode 30 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp.406.441.145,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.406.441.145,- dan Rp.747.880.107,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		269.771.902	#DIV/0!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		116.755.963	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	-	-	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	-	245.142	
Jumlah Penyusutan	-	386.773.007	#DIV/0!
			0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	0,00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0,00
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	386.773.007	#DIV/0!

Uraian Beban penyusutan dan Amortisasi diatas terdiri dari :

2. Akumulasi penyusutan peralatan dan Mesin (penyusutan Reguler Semesteran)
Sebesar Rp. 0,-;
3. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan (penyusutan Reguler semesteran)
sebesar Rp. 0,-;
4. Akumulasi Penyusutan Jalan, irigasi dan Jaringan (penyusutan Reguler semesteran)
sebesar Rp. 0,-
5. Akumulasi Penyusutan Jaringan (penyusutan Reguler semesteran) sebesar Rp. 0,-

Beban Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp.

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0,-, Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	0	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Lain-lain
Rp0.00

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	-
Jumlah	0	0	-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Surplus /Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional Rp0

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 Desember 2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan non Operasional lainnya	0	0	
Beban dari Kegiatan non Operasional lainnya	0	0	-
Jumlah Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0		
Penjualan Alat Kantor	0	-	-
Jumlah surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional lainnya	0	0	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	-

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode 30 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa periode 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31-Dec-23	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E . PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.

21.568.263.551,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.21.568.263.551,- dan . Rp. 22.374.812.224,-

Defisit LO

Rp.(9.857.392.965)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.(9.857.392.965,-) dan Rp.(8.649.498.716,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp,0.

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp.59.400

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 59.400,- Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-
Pita Cukai,Materai dan Leges	-
Bahan Baku	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0,-

E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp.0,-

E.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0- dan .Rp.0,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Periode 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Rp0,00

E.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Atas
Entitas
Rp.10.293.908.920
,-

E.7 Transaksi Atas Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.10.293.908.920,- dan Rp. 7.842.890.643,-
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	-

E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp.() sedangkan DKEL sebesar Rp.0,-

E.7.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,-

No	Jenis	Entitas Asal	Total
1	Sertifikat	BKIPM	-
2			-
3			-
4			-
5			-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0

E.7.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,- dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang 31 Desember 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp.0,-.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung 31 Desember 2023 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir Rp21
973.015.121.

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 22.004.779.506,- dan Rp.21.568.263.551,-

F . PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan,-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Rekening Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Terdapat pada Bank BNI Persero Cabang Pelabuhan Panjang dengan nama BPg017 Balai KIPM Lampung dengan Nomor 9890456496151000. Daftar Rekening Pemerintah

1. Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.44.383.174,- Terdiri dari

- a. Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 11.692.000,-.
- b. Belanja Pegawai Berupa Uang Lembur bulan Desember 2023 sebesar Rp.6.404.000,-.
- c. Belanja Langganan Listrik Bulan Desember 2023 sebesar Rp.22.746.534,-
- d. Belanja Langganan Telepon Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 1.813.750,-.
- e. Belanja Layanan Daya dan Jasa Lainnya sebesar Rp.1.726.890,-

2. Belanja Dibayar dimuka sebesar Rp.7.500.000.

- a. Belanja Sewa Gudang Arsip sebesar Rp.7.500.000 untuk 2 bulan dengan perjanjian kontrak Nomor : 17/BKIPM.LPG/PL.420/II/2023 dengan jangka waktu sewa 1 Tahun mulai tanggal 1 Maret 2023 – 1 Maret 2024 dengan nilai sewa untuk 1 Tahun sebesar Rp. 45.000.000,-

3. Kegiatan Prioritas Nasional yang ada di Balai KIPM Lampung Tahun 2023 :

- a. 3989.PDC - Sertifikasi Produk 001 - Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI 25.000.000
- b. 3989.QIA - Pengawasan dan Penedalialan Produk 001 - Hasil Perikanan di Wilayah RI yang diawasi mutunya 157.000.000

- c. 3989.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 001 - Unit Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability 14.000.000
- d. 3989.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 002 - UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 150.000.000
- e. 3989.RAL - Sarana bidang kemaritiman, Kelautan dan Perikanan 001 - Sarana Pengujian Mutu 777.637.000
- f. 3988.PDC - Sertifikasi Produk 001 - Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik 346.633.000
- g. 3988.PDF - Sertifikasi Lembaga 001 - Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity 115.900.000
- h. 3988.QCE - Penanganan Perkara 001 - Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaan yang di selesaikan 18.657.000
- i. 3988.RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan 001 - Sarana pengawasankarantina 158.000.000
- j. 3990.PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 001 - Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan 96.500.000
- k. 3990.PDD - Standarisasi Lembaga 002 - Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen 41.000.000
- l. 3990.QDC - Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat 001 - Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu 675.000.000
- m. 3990.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Usaha Perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar sistem dan regulasi 21.000.000

